**STATUS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4)
PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**

Gunawan Hadi Purwanto ¹⁾, Mochamad Mansur ²⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

Email: gunawan hadipurwanto565@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

Email: mochamadmansuresha@gmail.com

ABSTRACT

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Penghulu yang merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut Penghulu dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis, artinya sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis status dan kedudukan hukum yang ingin didapatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Kata Kunci: Status, Pencatatan Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) menguraikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, sesuai sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting, melainkan sebuah proses membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga konsekuensi dengan kebijakan hal tersebut bahwa setiap perkawinan harus dilakukan proses pencatatan di Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan. Petugas yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Penghulu yang merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Guna melaksanakan

pencatatan perkawinan tersebut Penghulu dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan atau disebut dengan istilah (P4) yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu.

Petugas P4 dalam menjalankan tugasnya dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda pada beberapa daerah di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Modin, di pulau Sumatra dikenal dengan sebutan Amil, dan di Pulau Kalimantan disebut dengan Lebay.¹ Keseluruhan sebutan tersebut secara umum dikenal dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (P3NTR). Pembentukan jabatan P4 pada awalnya bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang berada di luar pulau Jawa dan Madura dengan menempatkannya di beberapa daerah Kecamatan. Legalitas pengaturan tentang P4 terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I

¹ Ade Saputra, *Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018*, SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 3 Issue 3 2019

Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA.

Padahal dengan keberadaan petugas P4 setiap desa yang ada di wilayah KUA Kecamatan Sumberrejo tersebut, maka KUA dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya khususnya dalam pencatatan administratif perkawinan sebagai wilayah teknis kementerian Agama akan sangat terbantu. Namun yang menjadi persoalan adalah status dan kedudukan hukum seperti apakah yang didapat oleh petugas P4 di samping tugas dan fungsinya yang sangat nyata dalam kehidupan bermasyarakat dalam proses pencatatan perkawinan.

Berikut ini merupakan nama-nama petugas P4 yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, yaitu:

No	Nama Petugas	Wilayah Desa (P4)
1.	DASIRAN	Sumberrejo
2.	A PRIYONO	Sumberrejo
3.	SUYUTI	Sumuragung
4	ALI MAHMUDI	Sumuragung
5	MIFTAHUL ULUM	Prayungan
6	TAMAT	Prayungan
7	MAT IMRON	Margoagung
8	SUHADAK	Mejuwet
9	ISMAIL	Butoh
10	RAHMAD	Tulungrejo
11	M. YASIN	Jatigede

12	PORWADI	Karangdowo
13	MUKLAS A.P	Karangdowo
14	SUNGKON O	Pejambon
15	M. MUSLIH	Pejambon
16	A. SUYUTI	Bogangin
17	WARTO	Pekuwon
18	LASTAM	Pekuwon
19	MARTONO	Deru
20	SUKIRIN	Kayulemah
21	MUHAMMA D HABIB	Kayu Lemah
22	M. ROFIQ, S.PdI	Teleng
23	KADISUN	Karangdinoyo
24	GHO FAR ISMAIL	Wotan
25	MUHLISIN	Banjarejo
26	MAHMUD	Sumberharjo
27	MASKUN	Sumberharjo
28	M. FAQIH	Mlinjeng
29	H. SETYO HADI	Sambongrejo
30	JAIMIN	Kedungrejo
31	DARKAH	Tlogohaji
32	M. AMIN JUNAIDI	Tlogohaji
33	MAT OHA, S.Ag	Ngampal
34	SUDIMAN	Ngampal
35	NASIKUN	Ngampal
36	SYUKUR	Sendangagung
37	SUJONO	Talun

Ketidakpastian status hukum P4 yang ada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro masih menjadi persoalan hingga saat ini yang harus segera diperjelas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam tugas pelayanan bagi masyarakat. Sehingga dalam

penelitian ini dapat dirumuskan dalam sebuah judul, yaitu : “Status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan?
2. Bagaimanakah status atau kedudukan yang ingin didapatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Untuk mengetahui status atau kedudukan yang ingin didapatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

(P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi para pembuat kebijakan mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah petugas (P4).
2. Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara pengambilan sebuah kebijakan, supaya bisa dilakukan perbaikan yang efektif dalam pengembangan sistem hukum serta kepastian bagi petugas (P4).

2. METODE

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis, artinya sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²

2.2. Fokus Penelitian

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 51

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis status dan kedudukan hukum yang ingin didapatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. hal tersebut sangat penting dan perlu dilakukan kajian-kajian di samping peranan dan fungsi Petugas P4 sangat jelas di masyarakat, supaya terang permasalahan dan mendapatkan solusi yang tepat yang dapat dilaksanakan oleh para pihak yang memiliki tanggungjawab.

2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan beberapa informasi dan bahan hukum di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
3. Petugas P4 di seluruh Desa yang ada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo

2.4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:³

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.
2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

2.5. Sumber Bahan Hukum

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*field research*) atau didapatkan secara langsung di dalam masyarakat.⁴

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari hasil penelaahan kepustakaan atau penlaahan terhadap berbagai literatur atau

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Edisi Revisi, Surabaya, hal. 134-136

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op.Cit.*

bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

2.6. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, yang merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang mana dalam wawancara tersebut dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁵

2.7. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yang artinya adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu peneliti dalam penelitian ini tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Op.Cit.** hal. 158

Saat ini status para petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tentang petugas P4, bahwa petugas tersebut di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bukan merupakan bagian dari Kementerian Agama Bojonegoro dan tidak dapat diberikan Surat Keputusan sebagai Petugas P4, hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu :⁶

1. Adanya Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 977 Tahun 2018

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan merupakan penjabaran dan tindak lanjut terkait petugas P4 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Surat Keputusan tersebut diterbitkan untuk memperjelas keberadaan petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di wilayah KUA yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

⁶ Wawancara dengan Bapak M. Ali Saifuddin, S.Ag., M.Pd.I selaku JFU Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib

dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tersebut menegaskan bahwa Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengangkat petugas P4 dengan Surat Keputusan untuk membantu tugas Penghulu dalam melakukan pencatatan perkawinan, menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan, namun berkedudukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan Tipologi :

- a. D1 yaitu Kantor Urusan Agama yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan (Daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan).
- b. D2 yaitu Kantor Urusan Agama yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluas, dan daerah perbatasan di kepulauan (Daerah terluar/perbatasan Negara, dan atau kepulauan).

Secara administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Tipologi tersebut berada di luar Jawa dan Madura.

2. Tipologi wilayah KUA Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo merupakan salah satu wilayah teknis dari Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan di Jalan Kauman Desa Sumberrejo Kec. Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur 62191. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo sebagai salah satu unit pelayanan publik, sudah selayaknya mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat meliputi beberapa hal di antaranya adalah pelaksanaan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah atau rujuk, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, bimbingan syariah serta penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Status KUA Kecamatan Sumberrejo saat ini terkategori sebagai Kantor KUA dengan Tipologi B karena memiliki jumlah peristiwa perkawinan antara 50 s.d 100 peristiwa rata-rata per/bulan. Oleh karenanya dengan kualifikasi tipologi B tersebut KUA Kecamatan Sumberrejo tidak dapat merekomendasikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro untuk mengangkat petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), karena akan bertentangan dengan Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 977 Tahun 2018, yang mensyaratkan diangkatnya petugas P4 di wilayah KUA dengan Tipologi D1 dan D2 karena dengan

keadaan geografis yang sangat luas, sehingga tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di banding dengan luas wilayah.

Dengan beberapa alasan tersebut, maka saat ini status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, adalah sebagai berikut :⁷

1. Bukan Petugas dari Kantor Kementerian Agama Bojonegoro
Sejak Diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4, dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Praktis setelah edaran tersebut diterbitkan maka perihal perkawinan sudah mutlak menjadi tanggungjawab pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo tanpa harus melibatkan petugas

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam proses administratif calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan, namun pihak KUA sendiri yang secara aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masyarakat dalam bidang perkawinan. Karena dengan adanya Perdirjen BIMAS Islam Nomor 977 Tahun 2018 tersebut semakin menegaskan bahwa petugas P4 bukan sebagai bagian daripada Kementerian Agama. Secara otomatis petugas P4 tidak dapat menerima honor dari Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, padahal kedudukannya terasa sangat penting untuk menjelaskan kepada warga desa mengenai kelengkapan administrasi perkawinan, termasuk tes urin di puskesmas untuk mengetahui kesehatan calon dari setiap pasangan pengantin, dan sebagainya.

2. Petugas yang diusulkan oleh Desa
Ketidakjelasan status daripada petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut cukup memprihatinkan walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa Petugas P4 ini merupakan perpanjangan tangan para penghulu di berbagai daerah dan kehadirannya sangat diperlukan di tiap desa termasuk di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo

⁷ Wawancara dengan para Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro.⁸ Padahal proses pencatatan perkawinan secara administratif akan sangat menjamin hak-hak suami dan istri disamping ikatan lahir batin yang tercipta dari perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan catatan formal administrasi yang memperkuat pelaksanaan perkawinan. Tanpa adanya catatan yang mengikat antar suami dan istri justru memungkinkan terjadinya penyimpangan dan tidak terjaminnya hak masing-masing.⁹

Dari keseluruhan petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Sumberrejo saat ini diangkat dan diusulkan sebagai karyawan desa dengan Surat Tugas maupun Surat Keputusan dari Kepala Desa yang diperbantukan mengurus bidang Nikah, Talak Cerai, Rujuk (NTCR) di Desa tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, hingga usia 60 tahun dan sepanjang yang bersangkutan masih dianggap mampu menjalankan tugasnya atas penilaian dari

Kepala Desa.¹⁰ Padahal ketika diperhatikan dengan seksama tugas dari pada petugas P4 di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Sumberrejo, di antaranya adalah :

a. Membantu bidang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

1. Nikah

Setiap pasangan yang hendak melangsungkan proses perkawinan tentu harus mempersiapkan segala keperluan secara administratif demi berlangsungnya prosesi perkawinan dengan baik. Beberapa dokumen tersebut harus dipersiapkan dari Desa asal calon pasangan pengantin, seperti:

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1);
2. Surat keterangan asal-usul (model N2);
3. Surat persetujuan mempelai (model N3);
4. Surat keterangan tentang orangtua (model N4);
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.

Semua dokumen tersebut secara proses akan dibuatkan oleh petugas P4 untuk kemudian dilengkapi dengan persyaratan data pribadi calon pengantin untuk meudian

⁸ Wawancara dengan Bapak H. Masbukin Elya, S.Ag., M.Hi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2020

⁹ A. Priyono, S.Pd, salah satu petugas Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di Dusun Pandanwangi Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

¹⁰ Wawancara dengan Para Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), **Op.Cit.**

didaftarkan di Kantor
Urusan Agama
Kecamatan.

2. Talak dan Cerai

Talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Sedangkan Cerai yaitu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami. Pada hakikatnya setiap pasangan suami isteri menginginkan sebuah keutuhan dalam membangun keluarga dalam rumah tangga. Namun secara fakta telah menunjukkan angka perceraian semakin tinggi dan terus mengalami peningkatan. Beragam faktor menghiasi setiap proses perceraian, seperti adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib lagi di kehidupan bermasyarakat, namun sebuah perceraian sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ketika kedua pasangan telah memutuskan tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya yang harus berakhir dengan perceraian. Dalam konteks Talak dan Cerai ini sering kali petugas P4 diminta oleh Kepala Desa selaku atasan saat ini ketika terdapat warga Desa yang memiliki kehendak mengakhiri rumah tangga dengan mengajukan perceraian untuk diupayakan

proses mediasi supaya keduanya rukun kembali.¹¹ Proses tersebut tidaklah mudah, namun petugas P4 tetap berkomitmen melayani dan mengabdikan kepada masyarakat supaya talak maupun cerai ini sedapat mungkin untuk dihindarkan dalam kehidupan masyarakat, sekaligus ini membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas dari petugas P4 untuk meyakinkan para pihak yang berselisih supaya berdamai kembali.

3. Rujuk

Rujuk ialah kembali terjadi hubungan suami isteri antara seorang suami yang telah menjatuhkan talaq kepada isterinya dengan istri yang telah ditalaq-nya ataupun sebelum selesainya masa *iddah* seorang istri yang diceraikan oleh suaminya tersebut dengan cara yang sederhana. Cara tersebut tidak sembarang orang memahami syarat dan rukun rujuk, sehingga keberadaan petugas P4 ini sangat nyata dan sangat membantu bagi masyarakat di Desa.

b. Mengurus tugas perawatan Jenazah

Tidak kalah pentingnya dengan tugas di bidang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk tersebut, tugas lain yang juga diemban langsung oleh petugas P4 dari setiap Desa adalah mengurus Jenazah warga masyarakat di setiap Desa. Merawat jenazah, seperti

¹¹ Ibid.

memandikan, mengkafani, menguburkan hingga mendoakan adalah sebuah hal yang sangat penting yang diemban oleh seorang petugas P4 tersebut, dan sering dibilang bahwa tugas tersebut hanya dapat dijalankan oleh orang-orang yang ikhlas (mukhlisin).

Dalam status atau kedudukan yang saat ini diberdayakan oleh masing-masing Desa tersebutlah petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) mendapatkan kesejahteraan yang berbeda-beda, bahkan ada petugas P4 yang hanya mendapatkan salah satu dari beberapa hak/insentif yang diterima, di antaranya adalah sebagai berikut:¹²

1. Tanah Bengkok/Sawah dengan luas 1.750 m² (0,175 ha)
Tanah bengkok merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa yang dapat dikelola untuk kesejahteraan Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Sebanyak 27 petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) sebanyak (75%) dari 37 petugas P4 yang telah peneliti kunjungi dari jumlah keseluruhan 36 petugas yang ada di wilayah Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugasnya diberikan kesejahteraan berupa tanah/sawah milik Desa (tanah bengkok) yang dapat dikelola sepanjang masih menjabat sebagai petugas P4 di Desa masing-masing tersebut. Besaran kesejahteraan tersebut dianggap oleh sebagian besar petugas penerima sudah sangat

bersyukur dan berterima kasih kepada Kepala Desa, karena dengan tanggung jawab yang demikian kompleks maka sudah sepatutnya kesejahteraanpun betul-betul diperhatikan. Meskipun ada beberapa petugas P4 yang merasa perlu ditingkatkan mengingat beban tugas yang dijalankan sangat *urgen* di masyarakat.

2. Insentif Sebesar Rp.1.200.000,- Per/Tahun
Insentif berupa uang tersebut merupakan bentuk perhatian lain yang diberikan oleh Kepala Desa kepada petugas P4 mengingat keadaan maupun kemampuan Desa dalam memberikan kesejahteraan. Sebanyak 10% (4 dari 37 petugas P4 yang telah peneliti kunjungi, total 36 petugas P4 Se-Kecamatan Sumberrejo) menerima insentif sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap tahunnya dan diterima setahun sekali menjelang hari raya idul fitri dan ada juga yang diterima sebanyak 2 kali dalam setahun.
3. Insentif Sebesar Rp.500.000,- Per/Tahun
Sebesar 15% (6 dari 37 Petugas P4 yang telah peneliti kunjungi, total 36 petugas P4 Se-Kecamatan Sumberrejo) yang justru hanya mendapatkan insentif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setahun yang biasanya diterima saat menjelang hari raya idul fitri. Kondisi demikian dianggap oleh petugas memang sangat tidak layak untuk sekelas petugas dengan beban kerja yang demikian beragam, namun karena

¹² Ibid.

semua itu kembali kepada Kepala Desa, maka petugas hanya dapat berpasrah dan menjalankan tugas tetap dengan Ibadan, keikhlasan dan mengharap keridhoan dari Allah SWT.

Sehingga apabila beberapa bentuk kesejahteraan yang diterima petugas P4 tersebut digambarkan dalam bentuk tabel, adalah sebagai berikut :

NO	INSENTIF	PROSENTASE PENERIMA
1.	TANAH BENGKOK 0,175 ha	75% (27 PETUGAS)
2.	INSENTIF UANG Rp.1.200.000,- /Tahun	10% (4 PETUGAS)
3.	INSENTIF UANG Rp.500.000,- /Tahun	15% (6 PETUGAS)

2. Status atau kedudukan yang ingin didapatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Keberadaan petugas P4 pada prakteknya sangat dibutuhkan bagi anggota masyarakat karena kontribusinya yang sangat nyata bagi masyarakat untuk urusan perkawinan, belum lagi ketika terdapat anggota masyarakat yang memiliki intensitas pekerjaan yang padat/sibuk, sehingga tidak

memiliki waktu untuk datang ke KUA Kecamatan meskipun hanya sekedar untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Selain tidak memiliki waktu banyak, itupun tidak setiap anggota masyarakat memahami persoalan teknis proses ataupun persyaratan administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo. Hal tersebut nantinya dapat mempersulit masyarakat untuk mengurus administrasi, karena urusan perkawinan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari KUA, sehingga dampaknya ialah justru pihak KUA yang nantinya akan disalahkan oleh masyarakat. Padahal pemahaman masyarakatlah yang menjadi penyebabnya, sedangkan administrasi sudah teratur dengan benar. Oleh karenanya sudah menjadi organ penting antara Kantor Urusan Agama, petugas P4 dan anggota masyarakat. Sekaligus keberadaan petugas P4 sangat amat akan sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat, apalagi di daerah seperti Kabupaten Bojonegoro.

Dengan tanggungjawab sedemikian kompleks, maka sebagian besar petugas P4 dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) petugas P4 yang telah peneliti wawancarai yang ada di wilayah Kecamatan Sumberrejo tentu dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas tersebut, di samping ibadah tentu petugas P4 juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak terhadap keluarga, tentunya dengan segala kondisi dan beban kerja yang saat ini sangat jelas

dan nyata di masyarakat, maka setidaknya para petugas P4 tersebut menginginkan status atau kedudukan sekaligus kesejahteraan, di antaranya adalah sebagai berikut :¹³

1. Mendapatkan Insentif dari Kementerian Agama

Meskipun petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bukan bagian dari Kementerian Agama namun secara praktek pelayanan proses perkawinan sangat terbantu dengan keberadaan para petugas tersebut, sehingga sangat layak mendapatkan insentif. Insentif tersebut dapat dijadikan suatu sarana guna memotivasi dan dapat berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat beberapa hal yang sangat penting harus diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan sebelum dilakukan pemeriksaan administratif di kantor oleh Penghulu (Pegawai Pencatat Perkawinan), di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan Wali yang sah
Salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi agar perkawinan dinyatakan sah

adalah adanya wali yang menikahkan mempelai perempuan. Ketiadaan wali nikah menjadikan prosesi pernikahan tersebut batal dan dianggap tidak sah. Wali nikah adalah sebutan bagi pihak laki-laki dari keluarga perempuan yang bertugas mengawasi keadaan dan kondisi mempelai dalam prosesi perkawinan. Perwalian, secara syariat merupakan perkataan pada orang lain dan pengawasan atas keadaan si perempuan yang dinikahkan. Pemenuhan rukun nikah untuk mendatangkan wali ini dirujuk dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang berakal dan adil" (H.R.Ahmad). Selain itu, tidak sembarang orang berhak menjadi wali nikah. Ada juga urutan yang harus dipenuhi secara hierarki. Misalnya, laki-laki yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah mempelai perempuan. Jika ayah tidak bisa atau tidak memenuhi syaratnya, baru bisa digantikan dengan wali nikah yang lain sesuai urutan yang berlaku. Kedudukan Wali dalam Pernikahan yang berlaku sesuai syari'at Islam adalah:

1. Ayah Kakek Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung);

¹³ Wawancara dengan Para Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), **Op.Cit.**

2. Saudara laki-laki seayah
Anak laki-laki dari
saudara laki-laki
sekandung;
3. Anak laki-laki dari
saudara laki-laki seayah;
4. Paman sekandung;
5. Paman seayah;
6. Anak laki-laki dari
paman sekandung;
7. Anak laki-laki dari
paman seayah;
8. Wali hakim.

Urutan wali nikah di atas ditarik dari nasab (jalur keturunan) dari pihak ayah, dan bukan saudara seibu. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali yang dekat dari jalur keturunan tersebut. Jika tidak ada, maka keadaan ini diampu oleh wali jauh, dan jika masih tidak ada, maka mempelai dinikahkan oleh penguasa atau wali hakim. Wali hakim menjadi berlaku ketika semua urutan di atas sudah tidak bisa dipenuhi lagi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah. Bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa menjadi wali dalam pernikahan, kecuali memenuhi syarat-syaratnya. Kesemua urutan tersebut dari tingkat bawah di Desa hanyalah petugas P4 yang memiliki pengetahuan tersebut, oleh karenanya tidak sembarang orang mampu mengemban amanah dalam urusan

perkawinan selain daripada petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

- b. Pemeriksaan status hukum perkawinan calon pengantin

Selain persoalan wali nikah, status hukum calon pengantin terutama pengantin laki-laki juga perlu mendapatkan perhatian lebih, karena dikhawatirkan calon pengantin laki-laki apabila berstatus Duda yang dibuktikan dengan Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten/Kota, namun bukti autentik pendukung status tersebut diragukan keasliannya. Seorang petugas P4 juga wajib memiliki ketelitian terhadap status hukum perkawinan calon pengantin tersebut, jangan sampai ketika telah dilaksanakan perkawinan justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Oleh karenanya petugas P4 seringkali juga berkoordinasi dengan kantor Pengadilan Agama Bojonegoro perihal dokumen Akta Cerai (AC) yang digunakan perkawinan dikhawatirkan sedang dipalsukan.

- c. Melengkapi dokumen administratif perkawinan

Setiap kehendak perkawinan oleh masing-masing pasang calon pengantin sudah pasti wajib melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, meliputi dokumen:

1. Surat keterangan untuk nikah (N1);
2. Surat keterangan asal-usul (N2);

3. Surat keterangan tentang orang tua (N4);
4. Surat persetujuan mempelai;
5. Surat pemberitahuan kehendak nikah;
6. Menyertakan bukti imunisasi TT 1 dan TT 2 dari puskesmas;
7. Surat izin pengadilan;
8. Sertakan pas foto ukuran 2x3;
9. Surat izin dari atasan khusus untuk abdi Negara;

Kesemua persyaratan tersebut belum tentu setiap anggota masyarakat mengetahuinya atau justru akan kebingungan ketika mengurus secara pribadi dan tentu sangat membutuhkan keberadaan petugas P4 di masyarakat.

Oleh sebab itu, dengan beban tugas dan tanggung jawab yang sedemikian kompleksnya Kantor Urusan Agama sangat terbantu dengan keberadaan petugas P4, sehingga sudah layak pihak Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang dalam hal ini adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, memberikan penghargaan berupa insentif setiap bulan dengan besaran yang layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup saat ini, berikut dengan penghargaan menjelang hari raya idul fitri berupa THR kepada para petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).

2. Mendapatkan Insentif dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Insentif juga dapat diartikan sebagai imbalan maupun kompensasi atas prestasi kinerja yang diberikan oleh komponen teknis dalam sebuah kelembagaan. Dengan diangkatnya petugas P4 dibawah naungan Kepala Desa dengan Surat Tugas secara otomatis pembinaan dan sinergi pimpinan menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Secara otonomi bahwa Desa merupakan bagian integral penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa yang berada di bawah kekuasaan Pemerintah Kabupaten, sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengarahkan pandangannya kepada para petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) dalam mengemban tanggung jawabnya di masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Kota Blitar Propinsi Jawa Timur yang memberlakukan pemberian insentif dengan kisaran Rp.45.000,- hingga Rp.85.000,- per/bulan kepada para petugas P3N/P4 tersebut. Lain halnya dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang secara kemampuan keuangan Daerah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar, seperti pada tahun 2020 berkisar lebih dari Rp.5,5 Triliun. Apalagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2018 telah memberlakukan pemberian insentif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada para

- Ustad/Ustadzah sebagai guru mengaji pada Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) maupun Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) yang telah terdaftar yang dilegalitaskan dengan Peraturan Bupati. Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro turut memperhatikan kesejahteraan dengan insentif berupa materi sebesar Rp.100.000,- per/bulan kepada para petugas P4 karena bukan lagi menjadi bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro sama seperti halnya dengan yang telah diberikan kepada ustad/ustadzah.
3. Mendapatkan Kesejahteraan yang layak dari Pemerintah Desa
Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberrejo sudah sepatutnya menyeragamkan kebijakan dengan memberikan upah/insentif yang layak terhadap petugas P4 yang secara nyata telah membantu urusan pelayanan masyarakat di tingkat Desa. Kesejahteraan tersebut diupayakan dengan berupa:
 - a. Mengelola Tanah bengkok dengan luasan 2000 m² atau 0,2 ha selama menjabat petugas P4;
 - b. Mendapatkan tunjangan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan, dan dapat diterima sebanyak 2 kali dalam setahun;
 - c. Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) berupa barang apapun menjelang hari raya idul fitri;
 4. Mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
Didaftarkan menjadi anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan/BPJSK) di Kabupaten Bojonegoro oleh Pemerintah Desa menjadi salah satu harapan yang diinginkan oleh para petugas P4 yang ada di Kecamatan Sumberrejo. Karena di dalam menjalankan profesinya tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh petugas P4 ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan terdaftarnya di kepesertaan BPJSK maka para petugas P4 akan merasa lebih baik dan sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja bisa mendapatkan santunan dan jaminan terhadap perawatannya. Karena BPJSK merupakan Program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan Sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

5. Mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa

Surat Keputusan merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara/Pemerintah yang berisi sebuah tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang artinya keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara definitif. Artinya bahwa para petugas P4 sejauh ini dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas diberikan Surat Tugas oleh Kepala Desa dengan kurun waktu yang tidak jelas sepanjang dikehendaki oleh Kepala Desa. Hal tersebut sangat ironi ketika terjadinya proses politik pemilihan Kepala Desa dan kemudian terjadi perbedaan pilihan terhadap para calon, sehingga memungkinkan terjadi perselisihan apabila terdapat petugas P4 yang kedapatan tidak mendukung Kepala Desa terpilih dan bisa saja mereka diganti dengan sewenang-wenang oleh Kepala Desa tersebut. Oleh karenanya para petugas P4 ini mengharapakan diberikan Surat Keputusan (SK) oleh setiap Kepala Desa yang secara definitif akan mampu memperjelas kedudukan mereka dan menghindarkan tindak sewenang-wenang mengganti petugas P4 oleh Kepala Desa.

6. Mendapatkan bagian atas biaya perkawinan di luar Kantor Urusan Agama Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 mengenai Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama, bahwa menikah di KUA tidak dipungut biaya. Namun perlu diingat pula bahwa pernikahan secara gratis di KUA hanya berlaku pada waktu jam kerja yaitu di antara hari Senin sampai dengan hari Jumat, kemudian di luar waktu dan luar Kantor KUA, misal dilaksanakan di rumah, maka calon pengantin diwajibkan membayar tarif biaya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya nikah sebesar Rp.600.000,- tersebut secara urutan akan masuk terlebih dahulu ke dalam kas negara sebagai jenis pendapatan negara bukan pajak (PNPB). Kemudian Pemerintah akan menghitung pendapatan perbulan setiap KUA, yang nantinya akan dikeluarkan sebagai uang pengganti, seperti biaya transportasi penghulu, dan untuk hal-hal yang sifatnya administratif. Oleh karenanya secara administratif petugas P4 telah membantu rangkaian proses perkawinan calon pengantin maka sudah selayaknya petugas tersebut mendapatkan bagian dengan besaran yang layak atas biaya nikah tersebut.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa status para petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro bukan merupakan bagian dari Kementerian Agama Bojonegoro, dengan dasar Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 977 Tahun 2018 dan Tipologi wilayah KUA Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Sehingga status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Bukan Petugas dari Kantor Kementerian Agama Bojonegoro namun sebagai petugas Desa yang diangkat dan diusulkan sebagai karyawan desa dengan Surat Tugas maupun Surat Keputusan dari Kepala Desa yang diperbantukan mengurus bidang Nikah, Talak Cerai, Rujuk (NTR) di Desa tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo.

2. Bahwa dengan segala kondisi dan beban kerja yang saat ini sangat jelas dan nyata di masyarakat, maka setidaknya para petugas P4 tersebut menginginkan status atau kedudukan sekaligus kesejahteraan, di antaranya adalah:
 - a. Mendapatkan Insentif dari Kementerian Agama;
 - b. Mendapatkan Insentif dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Mendapatkan Kesejahteraan yang layak dari Pemerintah Desa;
 - d. Mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa;
 - e. Mendapatkan bagian atas biaya perkawinan di luar Kantor Urusan Agama Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

B. Saran-Saran

1. Diharapkan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini sebagai lembaga yang salah satunya memiliki kewenangan dalam mengatur regulasi di bidang perkawinan supaya jangan terbang pilih dengan hanya mengakui dan mengangkat petugas pembantu pegawai pencatat perkawinan (P4) untuk wilayah dengan Tipologi D1 maupun D2, namun harus mencakup seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat di tingkat Daerah Kabupaten seperti di Bojonegoro yang notabene sebagai masyarakat Perdesaan (agraris) dengan segala keterbatasan sumber daya manusia masih sangat membutuhkan keberadaan petugas P4 tersebut, meskipun Kementerian Agama di bidang Perkawinan telah memberlakukan kebijakan pendaftaran perkawinan secara Online melalui aplikasi SIMKAH Web (Sistem Informasi Manajemen Nikah) namun masih dengan segala keterbatasan dan sulit dipahami oleh warga masyarakat.
2. Diharapkan ketiga lembaga sebagai berikut, meliputi: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu untuk duduk bersama dengan berdiskusi secara mendalam bahwa secara nyata keberadaan petugas P4 di masyarakat khususnya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sangat membantu

baik dalam urusan bidang perkawinan maupun non perkawinan bagi masyarakat. Oleh karenanya sudah sepatutnya ketiga lembaga tersebut bersinergi dengan mengupayakan keinginan-keinginan sederhana dari para petugas tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerjanya.

5. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mahmud Peter Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Edisi Revisi, Surabaya

b. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 mengenai Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
- Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- Surat Edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015

Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

c. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Ade Saputra, *Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018*, SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 3 Issue 3 2019

d. Wawancara

- Wawancara dengan Bapak M. Ali Saifuddin, S.Ag., M.Pd.I selaku JFU Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib
- Wawancara dengan Bapak H. Masbukin Elya, S.Ag., M.Hi, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2020
- Wawancara dengan para Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro